

## **OPINI**

## Kebijakan Pendidikan yang Pro-rakyat

(Refleksi Peringatan Hari Pendidikan Nasional)

## Oleh ALFITRI

Dosen FISIP dan Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya

ebijakan sekolah gratis yang diterapkan dan diluncurkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu contoh keberpihakan negara terhadap upaya memecahkan persoalan mendasar dalam memperbaiki butu sumber dava manusia.

Intervensi ini harus didukung oleh semua komponen, tidak hanya pemerintah provinsi tetapi juga pemerintah kabupaten/kota juga berperan dalam mengolkan kebijakan ini. Begitu pula peran wakil rakyat baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota seyogyakan akan mengeluarkan peraturan daerah berupa Perda untuk memberikan payung hukum agar kontinuitas program ini dapat dipertahankan walaupun kepemimpinan daerah berganti.

Hal ini berarti bahwa otonomi yang bertanggung jawab merupakan konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan pela-yanan dan kesejahteraan masyarakat vang semakin baik (Widodo, 2008:2-3).

Pelayanan di bidang pendidikan sudah sewajarnya ditempatkan pada posisi penting dalam mengejar ketinggalan bangsa ini dari negara lain khususnya dalam mutu sumber daya manusia.

Oleh sebab itu keterampilan baru (new skill) seorang pemimpin daerah di masa depan meliputi visi bersama (shared vision), membangun visi bersama (building shared vision) dan berfikir sistemik (engaging in system thinking) (Widodo, 2008:6) adalah syarat mutlak bagi pemimpin publik dalam merealisasikan janji politik pada saat dia diberi amanah untuk memimpin daerah.

Tidak banyak daerah yang telah menerapkan kebijakan publik pro rakyat

di bidang pendidikan. Untuk tingkat kabupaten seperti Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Jembrana, sedangkan ditingkat provinsi, satu-satunya provinsi di Indonesia yang menetapkan program se-kolah gratis sampai tingkat SMU adalah provinsi Sumatera Selatan.

Sebagai sebuah produk kebijakan politik, sekolah garis adalah wujud nyata keberpihakan negara terhadap dunia pendidikan, di tengah-tengah isu tentang mahalnya biaya pendidikan.

Pencanangan program sekolah gratis di Sumatera Selatan, selain merupakan realisasi janji politik gubernur Sumsel, juga merupakan salah satu bentuk terobosan kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat, terutama kalangan menengah ke bawah yang selama ini kurang menjadi perhatian pemerintah.

Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo meresmikan sekolah gratis dari tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas di Sumatera Selatan, pada tanggal 25 Maret 2009. Selain di Sumatera Selatan, Bambang Sudibyo mengajak beberapa gubernur Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan menyediakan sekolah gratis.

Dalam pidatonya, Bambang meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan peraturan daerah, agar sekolah gratis tidak disalahartikan. Sebab pengertian gratis antar daerah bisa berbeda. Oleh sebab itu, pendidikan gratis perlu dukungan pemerintah daerah.

"Tanpa dukungan Wali Kota dan Bupati serta DPRD tentu program ini tidak akan berjalan, karena itu sangat tergantung kemampuan keuangan daerah masing-masing," menurut menteri, yang tidak boleh adalah pungutan sekolah, kalau sumbangan boleh.

Sebab sekolah yang bagus adalah sekolah yang bisa mengumpulkan sumbangan dari komite sekolahnya, yang haram kata Menteri adalah pungutan. Jika ada sumbangan maka mutu sekolah itu tidak akan turun walaupun sekolah itu digratiskan.

Walaupun belum diterapkan secara penuh program sekolah gratis di Sumatera Selatan sudah menunjukkan komitmen kuat bagi semua pemimpin daerah agar kebijakan ini dapat diterapkan dengan tidak menggangu sektor lain.

Pada awalnya memang masih ada sejumlah pihak yang meragukan program ini dapat direalisasikan. Namun kekhawatiran ini menjadi musnah setelah program sekolah gratis sudah dicanangkan. Tinggal lagi bagaimana mengawal dan mengkritisi pelaksanaan program ini. Di sejumlah daerah sudah mengemuka adanya permasalahan yang perlu diantisipasi.

Pertama, pemerintah kabupaten/kota segera melakukan sosialisasi secara rutin agar terdapat pemahaman yang sama di masyarakat bahwa bagian mana saja yang digartiskan. Hal ini sangat penting mengingat pemahaman yang beragam terhadap pengertian "gratis", seperti sudah disinggung oleh Mendiknas.

Kedua, DPRD kabupaten/kota segera membuat payung hukum berupa Perda agar program ini dapat berjalan kontinu dan berkesinambungan serta sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Ketiga, perlu diantisipasi bagaimana pencairan dana untuk masing-masing sekolah agar tepat waktu, sehingga tidak mengganggu kelancaran program. Kekhawatiran ini muncul pada saat sekolah tidak memiliki anggaran sebelum anggaran dikucurkan, sehingga tidak memancing adanya konflik yang akan terjadi pada internal sekolah masing-masing.

Kebijakan sekolah gratis sudah dicanangkan, anggaran siap dikucurkan. Agar semua pihak melakukan kontrol supaya program ini dapat menjadi pilar keberhasilan Sumatera Selatan dalam membentuk sumber daya manusia yang memiliki keunggulan.

Keberhasilan kebijakan pendidikan ini akan menjadi ukuran bahwa negara telah melaksanakan sebagian hak rakyat dalam upaya mencerdasakan anak bangsa. Hak rakyat yang diperhatikan akan menjadi kunci utama bahwa janji politik dalam kampanye Pilkada sudah dibayar.

Akan tetapi tidak berhenti sampai disini, perlu dilihat lebih jauh apakah kebijakan publik yang digulirkan ini akan berpengaruh kepada peningkatan mutu sumber daya manusia di masa depan. Atau hanya sebuah jargon politik.

Inilah yang menjadi sorotan utama sebuah kebijakan publik harus bisa mengangkat nasib dan harkat warga negara sebagai sasaran akhir produk demokrasi. Jika janji-janji kampanye direalisasikan dalam bentuk kebijakan publik vang pro-rakyat maka kepemimpinan daerah dan kepemimpinan nasional bukan hanya tradisi ritual lima tahunan, tetapi mampu merubah nasib rakyat ke arah yang lebih baik. Semoga.